

BAB III

UPAYA INTERNASIONAL DALAM PROGRAM DENUKLIRISASI KOREA

UTARA

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai diplomasi Negara – Negara dalam menangani krisis nuklir Korea Utara dengan menggunakan forum bilateral dan multilateral, bab ini juga akan membahas pertemuan enam Negara (*Six Party Talks*) sebagai upaya dalam program denuklirisasi Korea Utara.

A. Upaya Mengakhiri Program Senjata Nuklir Korea Utara

Berbagai upaya dilakukan Negara – negara untuk mengentikan program nuklir Korea Utara, diantaranya melalui serangkaian perundingan bilateral maupun multilateral, Korea Utara secara turun temurun tampaknya tidak kunjung berhenti memancing banyak pemberitaan mengenai pergerakan nuklir yang dikembangkannya, salah satunya terlihat dari tindakan tidak konsisten Korea Utara dalam menyikapi segala pertemuan maupun kesepakatan mengenai nuklir di dalam forum internasional.

a. Upaya Denuklirisasi melalui Pertemuan Bilateral

1. The Agreed Framework 1994

Kerangka perjanjian antara Amerika Serikat dan Korea Utara ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 1994 antara Korea Utara (DPRK) dan Amerika Serikat.

Tujuan dari perjanjian ini adalah menghentikan tenaga nuklir Korea Utara dan

normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara.⁶⁴ Sebagai usaha diplomatik untuk upaya mengakhiri krisis nuklir, mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter mengunjungi Korea Utara dan bertemu dengan Kim Il Sung agar perang dapat dihindari.⁶⁵ Pada pertemuan ini tercipta negosiasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang pada akhirnya dapat menghentikan krisis nuklir. Negosiasi ini menghasilkan *Agreed Framework* (Kesepakatan Jenewa) tahun 1994 yaitu persetujuan yang berisi penghentian program nuklir Korea Utara dengan diikuti pembongkaran fasilitas nuklir di Yongbyon. Sebagai imbalannya, Jepang beserta Korea Selatan bersedia untuk membangun reaktor air ringan kapasitas 2000MW selain itu Amerika Serikat juga menyediakan 50.000 ton minyak solar setiap tahun untuk pemanasan dan pembangkit listrik sampai konstruksi pembangkit listrik tenaga air selesai dibangun. Dengan begitu terjadi normalisasi hubungan politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Korea Utara serta tercipta denuklirisasi di Semenanjung Korea. Korea Utara juga meneruskan keanggotaannya dalam NPT.

Sesuai dengan *Agreed Framework* maka pada tahun 1995 dibentuk KEDO (*Korean Peninsula Development Organization*) dengan tujuan membangun dua reaktor air ringan yang disediakan oleh Amerika Serikat, dan sebagai imbalannya Korea menghentikan dua reaktor air didih moderat grafit. Markas besar KEDO terletak di kota New York, dan negara anggotanya terdiri dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Australia, Kanada, Brunei, Kuwait, Arab Saudi,

⁶⁴ *Agreed Framework* http://en.wikipedia.org/wiki/Agreed_Framework diakses pada 12/2/2013

⁶⁵ Uk-Heo and Jung-Yeop Woo, *Op. Cit.*, hlm 493.

Belgia, Philipina, Thailand, Itali, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Jerman. Namun krisis nuklir Korea Utara putaran kedua pada tahun 2002 membuat semua proses konstruksi itu terhenti.

Pada tahun 1998, Korea Utara telah merancang dua misil jarak jauh yang dapat mencapai sebagian wilayah Amerika Serikat dan Jepang. Program misil ini sekali lagi mengundang perhatian serius akan cita-cita nuklir Korea Utara karena *Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)* tidak akan berarti apa-apa tanpa hulu ledak nuklir. Isu ini muncul pada 31 Agustus 1998 ketika Korea Utara meluncurkan salah satu misilnya dengan jangkauan jelajah 1700-2200 km yang melewati wilayah Jepang dan mendarat di bagian barat Hawaii, Samudera Pasifik. Uji coba misil ini membuat Amerika Serikat dan Jepang ingin berhenti mendukung *Agreed Framework*.⁶⁶

Namun jika *Agreed Framework* digagalkan, Korea Utara akan bereaksi dengan membuka kembali fasilitas nuklir di Yongbyon. Dan tindakan tersebut akan memberikan kesempatan Korea Utara memproduksi plutonium yang diperlukan bagi hulu ledak nuklir. Melihat keadaan ini bukan hanya Amerika Serikat dan Jepang saja yang merasa terancam tetapi seluruh negara yang berada di Asia Timur merasa harus memperkuat sistem pertahanan agar tidak menjadi sasaran rudal Korea Utara. Sepanjang periode berbahaya ini, Presiden Clinton melakukan peninjauan kebijakan yang dilaksanakan bersama antara Jepang dan Korea Utara. Peninjauan tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Korea Utara sedang mengalami situasi ekonomi yang sulit, kelaparan di mana-mana, namun kondisi sulit yang sedang

dihadapi Korea Utara tidak semerta-merta membuat rezim pemerintahannya hancur. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan harus berurusan dengan rezim Korea Utara yang terkesan selalu bersikap melawan.

Rekomendasi yang dihasilkan berisi dua strategi alternatif menghadapi Korea Utara.⁶⁷ Pertama, jika Korea Utara akan menjalankan program misil jangka panjang dengan menghentikan program senjata nuklirnya, maka Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan perlahan-lahan akan melakukan normalisasi hubungan politik dan ekonomi, termasuk menciptakan perdamaian. Kedua, jika Korea Utara tidak menunjukkan kemauan untuk menghentikan pengembangan nuklir, maka Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangkal ancaman.

Pada bulan Mei 1999, delegasi Amerika Serikat berkunjung ke Pyongyang untuk memberikan kedua rekomendasi tersebut. Selama perundingan, jelas bahwa Korea Utara secara serius tertarik dengan rekomendasi tersebut. Korea Utara melihat bahwa rencana ini akan membuka jalan pembangunan ekonomi yang memang dibutuhkan Korea Utara. Namun Korea Utara juga takut bahwa kontak ekonomi dengan dunia luar akan menimbulkan destabilisasi kontrol rezim dalam negeri.

Selama beberapa bulan, terdapat bukti bahwa rencana tersebut berjalan lancar. Korea Selatan dan Jepang masing-masing melaksanakan pertemuan yang pertama dengan Korea Utara. Dua bulan setelah pelantikan George W. Bush, Presiden Korea Selatan mengunjungi Amerika Serikat untuk meminta konfirmasi bahwa kebijakan

dengan Korea Utara selama ini akan dilanjutkan. Presiden Bush menyatakan akan membuat kebijakan baru. Kesepakatan tersebut kemudian berhenti, dan selama satu setengah tahun, tidak ada dialog ataupun kebijakan baru dengan Korea Utara.

Pada tahun 1994 hingga tahun 2002 ini, plutonium yang diproduksi Korea Utara masih diatur oleh kesepakatan sehingga produksi plutonium diharuskan pada tingkat yang rendah dan tidak diperbolehkan untuk dapat membuat senjata nuklir. Namun setelah berakhirnya kesepakatan, Korea Utara meningkatkan penyimpanan plutonium dan mulai berusaha melakukan uji coba nuklir. Kemajuan program nuklir tersebut memicu berbagai reaksi seluruh dunia.

Korea Utara telah tercatat beberapa kali menyepakati perjanjian mengenai nuklir, khususnya dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, namun kemudian Korea Utara pun mundur dan melanggar dari perjanjian-perjanjian tersebut. Pada tahun 1992 Korea Selatan dan Korea Utara menandatangani sebuah Deklarasi Bersama (*Joint Declaration*) mengenai Denuklirisasi Korea Peninsula. Dua negara setuju untuk tidak melakukan uji coba, membuat, memproduksi, menerima, memiliki, menyimpan, mengelola atau menggunakan senjata nuklir, tidak melakukan *reprocessing* energi nuklir atau pengayaan uranium, dan mereka setuju untuk menggunakan energi nuklir semata-mata untuk tujuan damai. Namun Deklarasi ini ditunda berlakunya karena Korea Utara mengancam akan keluar dari Traktat NPT. Acaman ini dibatalkan dengan adanya kesepakatan enam negara yaitu Korea Utara,

Amerika Serikat, Korea Selatan, Rusia, Cina, dan Jepang. Dalam waktu yang

ditandatangani tahun 2007 tersebut Korea Utara harus menghentikan proyek nuklirnya dalam beberapa tahapan.

b. Non Proliferation Treaty

Perjanjian Nonproliferasi Nuklir adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968, dan dibentuk oleh lima negara pemilik senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Russia, Inggris, Perancis, dan Cina, Perjanjian ini bertujuan untuk tidak memberikan persenjataan nuklir dalam bentuk apapun kepada negara-negara lain. Kelima negara tersebut juga memiliki kewajiban untuk melanjutkan negosiasi dengan itikad baik atas langkah - langkah efektif yang berkaitan dengan penghentian perlombaan senjata nuklir secepatnya dan pelucutan senjata nuklir, dan dalam perjanjian secara keseluruhan dan pelucutan senjata dibawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif⁶⁸. Badan yang berwenang mengawasi penggunaan nuklir tersebut adalah *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Sejauh ini NPT merupakan perjanjian pengendalian senjata yang paling diterima di dunia, karena hanya Israel, India, dan Pakistan yang tidak menandatangani perjanjian ini, sementara itu, Korea Utara mengundurkan diri pada tahun 2003.

Sebagian besar negara berdaulat (187 negara) mengikuti perjanjian ini, walaupun dua di antara tujuh negara yang memiliki senjata nuklir dan satu negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belum meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada

⁶⁸ United Nations, *The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*,

tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu non proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.⁶⁹

Korea Utara mulai bergabung dengan NPT pada 12 Desember 1985 namun tidak bersedia melengkapi perjanjian pengawasan dengan IAEA. Korea Utara pada akhirnya memenuhi ketentuan IAEA saat Amerika Serikat menarik senjata nuklirnya yang berada di Korea Selatan. Pada tanggal 27 September 1991 Presiden George W. Bush mengumumkan penarikan seluruh senjata nuklir taktisnya yang diletakkan di Korea Selatan. Pada 31 Desember 1991, kedua negara Korea menandatangani *South-North Joint Declaration on Denuclearization*. April 1992, Korea Utara pada akhirnya meratifikasi perjanjian pengawasan dengan IAEA.⁷⁰

Pada tanggal 4 Mei 1992, Korea Utara menyerahkan laporan mengenai tujuh lokasi dan 90 gram plutonium yang dimilikinya. Dari laporan tersebut, terdapat ketidaksesuaian data yang membuat IAEA pada 9 Februari 1993 meminta inspeksi khusus. Inspeksi khusus IAEA ini ditolak oleh Korea Utara. Kemudian pada 12 Maret 1993, Korea Utara mengutarakan niat pengunduran dirinya dari NPT dalam jangka waktu tiga bulan. Niat pengunduran diri tersebut akhirnya ditunda dan Korea Utara mau melakukan negosiasi. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk

⁶⁹Perjanjian NonProliferasi Nuklir, http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir diakses pada 10/2/2013

⁷⁰US and North Korea Key Security Development, <http://www.ncnk.org/resources/briefingpapers/all->

negosiasi dengan Amerika Serikat, Korea Utara akhirnya membuat kesepakatan dengan IAEA yang mengizinkan inspektor IAEA mengunjungi seluruh lokasi fasilitas nuklir yang dilaporkan. Akan tetapi Korea Utara menolak inspektor mengakses pabrik pengolahan plutonium di Yongbyon dan kemudian mendeklarasikan pengunduran dirinya dari IAEA pada tanggal 13 Juni 1994.

Negosiasi pun dilakukan kembali oleh Amerika Serikat hingga pada tanggal 21 Oktober 1994 Korea Utara dan PBB menandatangani *Agreed Framework*. Namun sekali lagi Korea Utara secara resmi keluar dari NPT dan menghidupkan program nuklirnya di tahun 2003. Pada awal tahun 2003 ini, Korea Utara kembali memproses cadangan plutoniumnya di Yongbyon yang mampu menghasilkan 20-28 kg senjata nuklir. Negara tetangga, Cina, Rusia, Korea Selatan dan Jepang sangat resah dengan adanya krisis ini, sementara keinginan mengisolasi Korea Utara oleh Amerika Serikat, secara ekonomi dan politik, akan mengakibatkan krisis di Semenanjung Korea secara berkepanjangan.

Adapun yang menyebabkan Korea Utara keluar dari NPT pada tahun 2003 dikarenakan posisi Korea Utara terlihat mengalami ketidakseimbangan dengan Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian kerjasama (*Agreed Framework*) yang dibentuk tahun 1994. Kondisi ketidakseimbangan tersebut ialah :

1. Amerika Serikat gagal untuk menghidupkan kerangka perjanjian kerjasama;
2. Amerika Serikat telah berjanji untuk menyediakan fasilitas pembangkit tenaga listrik dan reaktor berkekuatan ringan bagi pembangunan dalam

negeri Korea Utara sampai akhir tahun 2003. Namun kenyataannya sampai akhir 2002, hal ini tidak pernah dilaksanakan;

3. Amerika Serikat dan Korea Utara telah setuju untuk menormalisasikan hubungan politik dan ekonomi kedua negara. Namun pada kenyataannya, Amerika Serikat malah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dan memasukan Korea Utara ke dalam daftar negara yang patut dicurigai sebagai "*the axis of evil*";
4. Amerika Serikat telah berjanji tidak akan menggunakan kekuatan senjata nuklirnya. Namun pada kenyataannya Korea Utara kemungkinan besar menjadi target serangan *preemptive* yang dianut oleh Amerika Serikat;
5. Korea Utara telah setuju, mengizinkan hadirnya tim pemeriksa nuklir di Korea Utara tetapi setelah menerima fasilitas reactor ringan yang dijanjikan pihak Amerika Serikat. Namun kenyataannya Amerika Serikat tetap mengirimkan tim pemeriksa ke Korea Utara tanpa menepati janjinya terlebih dahulu.⁷¹

2. Treaty of Reconciliation and Non Aggression

Treaty of Reconciliation and Non Aggression pada 13 Desember 1991. Dibuat sebagai Deklarasi bersama sebagai upaya untuk denuklirisasi Korea Utara, pada perjanjian itu, Seoul dan Pyongyang sepakat untuk menghentikan hubungan permusuhan dan bekerja sama dalam bidang keamanan. Lalu pada September 1991,

⁷¹“*North Korea Non Proliferation Treaty*,” *Merriam-Webster’s Collegiate Encyclopedia USA*; Merriam

Amerika Serikat menyatakan akan memindahkan seluruh senjata nuklir taktis yang ditempatkan di Korea Selatan. Pada 18 Desember 1991, Presiden Korea Selatan Roh Taewoo turut mendeklarasikan bahwa tidak ada senjata nuklir di Korea Selatan.

Kemudian pada 19 Februari 1992, Korea Utara menerima perjanjian pengawasan yang disyaratkan oleh NPT untuk menerima inspeksi atas instalasi nuklir oleh IAEA. Perjanjian ini bernama *Joint Declaration of Denuclearization of the Korean Peninsula*. Deklarasi ini berisi bahwa kedua negara Korea setuju untuk tidak melakukan uji coba, membuat, memproduksi, menerima, memiliki, menyimpan, menempatkan atau menggunakan senjata nuklir. Kesepakatan ini juga mengikat dua negara untuk tidak lagi memiliki fasilitas pengelolaan nuklir dan pengayaan uranium. Sesuai dengan perjanjian, IAEA akan melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara. Korea utara juga harus mendeklarasikan kepemilikan material nuklir sesuai yang disyaratkan oleh IAEA. Namun berdasarkan analisa lingkungan dan gambar yang terdeteksi oleh satelit Amerika Serikat memperlihatkan bahwa Korea Utara memiliki jumlah plutonium yang lebih banyak dari yang dideklarasikan. Dengan hasil inspeksi itu, pihak IAEA meminta pemeriksaan khusus yang kemudian ditolak oleh Korea Utara. Meskipun sudah ada deklarasi tersebut, perselisihan yang dihadapi IAEA dan Pyongyang terus berlanjut. IAEA meminta Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendapatkan izin inspeksi khusus. Korea Utara merasa tersinggung dan mengancam untuk menarik keanggotaannya dari NPT pada tahun 1993. Usaha negosiasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara terjadi pada

tahun 1994 ketika IAEA melaporkan bahwa Korea Utara gagal memenuhi peraturan dan prosedur inspeksi.⁷²

Setelah sejumlah pembicaraan antara Washington dan Pyongyang, Korea Utara akhirnya mengumumkan untuk menunda penarikan keanggotaannya dari NPT. Namun Korea Utara tetap menolak akan adanya inspeksi yang ingin dilakukan oleh IAEA. Akhirnya Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, mengumumkan bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan akan menjatuhkan sanksi bagi Korea Utara jika Korea Utara bersikeras untuk memproduksi plutonium. Korea Utara menafsirkan sanksi tersebut sebagai pernyataan perang dan mengancam untuk membunuh Korea Selatan. Krisis nuklir Semenanjung Korea akhirnya terjadi.

Pemerintahan Clinton kemudian merencanakan operasi serangan *preemptive* terhadap fasilitas yang ada di Yongbyon. Serangan tersebut akan menghancurkan seluruh fasilitas dan materi nuklir di Yongbyon. Namun rencana ini dikhawatirkan akan mengakibatkan serangan satu juta pasukan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Untuk menghindari hal tersebut, maka Amerika Serikat menambah pasukan yang ditempatkan di Korea Selatan.⁷³

3. Upaya Cina dalam Denuklirisasi Korea Utara

Kebijakan Cina terhadap masalah semenanjung Korea secara resmi sesuai dengan doktrin ideologi yang dianut oleh Cina berdasarkan konsep “*one Korea*” atau “satu Korea”, yaitu pemerintah Cina hanya mengakui satu Negara Korea saja yakni Korea Utara sebagai Negara Korea yang sah. Meskipun secara resmi pemerintah Cina mendukung Korea Utara, tetapi pemerintah Cina tidak menghendaki tindakan militer Korea Utara terhadap Korea Selatan maupun Negara – Negara lainnya. Terutama setelah munculnya isu dugaan tentang pengembangan program senjata nuklir Korea Utara yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan Negara – Negara di dunia, khususnya di kawasan Asia Timur sendiri.

Pada dasarnya Cina mendukung segala upaya antisipasi atas kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam penyelesaian konflik. Cina juga sangat mendukung ide penghapusan senjata nuklir dari semenanjung Korea serta menentang keras setiap usaha pengembangan senjata pemusnah massal di semenanjung Korea tersebut. Untuk itu Cina berupaya untuk menghambat atau menghentikan program senjata nuklir Korea Utara, salah satunya dengan mengupayakan diselenggarakannya sebuah forum perundingan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu melalui *Six Party Talks* (perundingan enam pihak) yang terdiri dari perwakilan enam Negara, yakni: Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Melalui perundingan tersebut diharapkan krisis nuklir Korea utara tersebut dapat segera diselesaikan

Sejak diselenggarakannya *Six Party Talks* tersebut, Korea Utara terus mendapatkan berbagai tekanan dan juga kecaman dari berbagai Negara atas langkahnya untuk tetap dilakukan untuk membujuk Korea Utara agar bersedia menghentikan program nuklirnya tersebut. Namun di tengah berbagai upaya perundingan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara, pemerintah Korea Utara justru menyatakan bahwa negaranya telah berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 9 Oktober 2006 lalu. Akibatnya Cina yang semula sekutu Korea Utara menjadi turut mengecam tindakan Pyongyang tersebut.

Dr. Yuan (analisis dari Center for Non proliferation Studies) menyatakan tindakan Korea Utara ibarat “suatu tamparan pada wajah Cina” yang memiliki pertanyaan yang cukup beralasan tentang kemampuan Beijing untuk mempengaruhi Pyongyang. Berkurangnya pengaruh Cina juga terlihat jelas pada Juli 2006 ketika pemimpin tertinggi Cina mengingatkan Pyongyang untuk tidak menjalankan uji coba rudal, tetapi DPRK (Korea Utara) melakukan latihan rudal balistik keesokan harinya.⁷⁴

Cina yang masih menganggap Korea Utara sebagai penopang keamanan yang cukup penting bagi Cina perlahan setelah Korea Utara menguji coba rudalnya yang berkemungkinan dapat digunakan untuk melawan Cina membuat hubungan antar keduanya mulai berubah. Para pejabat Cina khawatir uji coba rudal Korea Utara dapat mendorong Amerika Serikat dan Jepang untuk mempercepat upaya – upayanya untuk

⁷⁴*The North Korean Nuclear Test: Regional and International Implications*, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, October 12, 2006

mengembangkan pertahanan rudal di Asia Timur Jauh.⁷⁵ Kekhawatiran Cina ini muncul karena Jepang merupakan salah satu Negara yang menjadi pesaing bagi Cina, mengingat hubungan antara keduanya yang tidak terlalu baik.

Saat ini hubungan Cina dan Korea tersebut semakin diperparah dengan adanya uji coba rudal, reaksi yang muncul dari para petinggi Cina secara signifikan sangat menentang keras tindakan Korea utara tersebut. Duta besar Cina untuk PBB, Wang Guangya, mengingatkan bahwa “Korea Utara akan menghadapi konsekuensi serius jika meneruskan program uji coba nuklirnya”.⁷⁶

Setelah uji coba nuklir tersebut pemerintah Cina secara tegas menuntut kesetiaan Korea Utara terhadap komitmennya untuk menciptakan perdamaian di semenanjung Korea yang bebas nuklir dan menghentikan seluruh tindakan yang dapat memperburuk situasi.

Pemerintah Cina mengkhawatirkan dampak dari uji coba nuklir tersebut dapat mempengaruhi ketegangan dan stabilitas keamanan kawasan. Dengan adanya program nuklir Korea Utara, dikhawatirkan akan membangkitkan keinginan Negara – Negara lain di kawasan tersebut untuk ikut memulai program nuklirnya, termasuk Taiwan yang selalu memerdekakan diri dari Republik Rakyat Cina.

Cina khawatir pengembangan rudal dan program nuklir Korea Utara dapat memicu adanya perlombaan senjata dan peningkatan militerisasi di kawasan Asia Timur yang dapat mempengaruhi posisi Cina di Asia Timur. Keberhasilan program

⁷⁵ *CNS Special Report on North Korean Ballistic Missile Capabilities*, Center for Nonproliferation Studies, www.cns.miis.edu, hal 8

⁷⁶ *Asia Pacific Currents: Reaction Signals & Risks with North Korea*, hal 2, www.ict.com

nuklir Korea Utara ini adalah suatu bencana bagi Beijing karena hal ini membuat Cina kelihatan lemah sebagai suatu Negara, di mana hal ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar,⁷⁷ keberhasilan nuklir Korea Utara juga akan memberikan kemungkinan kebangkitan kekuatan pertahanan dan keamanan Jepang yang dapat mengancam posisi Cina di kawasan. Hal ini merupakan tantangan serius bagi rencana Beijing untuk membangun kekuatan militernya yang bertujuan untuk menjadikan Cina sebagai kekuatan dominan di Asia.

c. Upaya Denuklirisasi melalui Pertemuan Multilateral

1. Six Party Talks

Six Party Talks merupakan perundingan yang ditujukan untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara melalui proses negosiasi yang melibatkan enam Negara yaitu Cina, Amerika Serikat, Korea Utara dan Korea Selatan, Jepang, dan Rusia. Perundingan dimulai pada bulan Agustus 2003, namun hingga sekarang sangat sulit untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berunding. Amerika Serikat beranggapan bahwa proses denuklirisasi Semenanjung Korea harus dimulai dari kesediaan Korea Utara untuk menghentikan segala aktifitas pengayaan nuklirnya, namun bagi Korea Utara penghentian program nuklir harus dimulai dari Amerika Serikat sebagai Negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia dan menghilangkan politik “bermusuhan” kepada Pyongyang.

Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara, melalui forum multilateral Pertemuan Segi-6 diharapkan Korea Utara setuju untuk

menonaktifkan program nuklirnya. Namun pada kenyataannya pada tahun 2008, Korea Utara secara resmi memutuskan untuk tidak menghadiri forum multilateral Pertemuan Segi-6 (*Six-Party Talks*) hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Cina aktif melakukan upaya lebih keras untuk melanjutkan perundingan enam pihak, beberapa pertemuan dilangsungkan di Cina, menurut Cina *Six Party Talks* merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam proses denuklirisasi di semenanjung Korea dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Timur Laut. Tensi di kawasan semenanjung masih panas menyusul aksi saling tukar serangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kondisi ini membuat Cina mengusulkan keenam pihak di *Six-Party Talks* menggelar suatu pembicaraan darurat. Komunitas internasional telah berulang kali meminta semua pihak menahan diri dan tetap tenang. Faktanya Amerika Serikat menggelar latihan bersama dengan Korea Selatan dan Jepang di wilayah perairan sekitar semenanjung. Latihan ini digelar berskala besar dengan melibatkan kapal induk USS George Washington., ini dapat membuat ketegangan baru di kawasan.⁷⁸

Six Party Talks sendiri sebenarnya telah berlangsung selama 9 tahun, terhitung dari tahun 2003 hingga kini. Namun, belum ada hasil yang benar-benar berhasil membuat Korea Utara bersedia untuk melucuti senjata nuklir yang dimiliki negaranya. Perundingan ini pun cenderung tidak memberikan suatu penyelesaian karena Korea Utara sempat beberapa kali menolak untuk melanjutkan proses

⁷⁸ *Militerania* <http://militerania.blogspot.com/2010/12/china-ngotot-unyakan-six-party-talks.html>

perundingan. Pada tahun 2005, Menteri Luar Negara Korea Utara mendeklarasikan pengunduran diri negara tersebut dari *Six-party Talks*⁷⁹. Pada tahun yang sama pula, Korea Utara secara eksplisit mempublikasikan program senjata nuklir yang mereka miliki. Namun pada 19 September 2005, Korea Utara menyetujui untuk meninggalkan program nuklir mereka, dengan bantuan pertahanan, keamanan, ekonomi, dan energi sebagai gantinya. Namun pada keesokan harinya, Korea Utara justru mengatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan program apapun terkait dengan pengembangan nuklir apabila tidak ada bantuan internasional yang mereka minta⁸⁰. Mendengar hal tersebut, Amerika Serikat memberikan sanksi finansial bagi bisnis Korea Utara. Namun hal tersebut tidak menghentikan Korea Utara untuk melanjutkan program nuklirnya. Bahkan, negara tersebut sempat beberapa kali melakukan percobaan nuklir pada kawasan Asia Timur

Perjanjian nuklir yang disepakati Korea Utara di tahun 1994 dengan Amerika Serikat yang akhirnya menemui kegagalan karena Korea Utara melanggar perjanjian tersebut di tahun 2002, kemudian juga pada perjanjian nuklir di tahun 2005, di mana Korea Utara setuju untuk mengabaikan program nuklirnya demi esistensi ekonomi dan insentif diplomatik dari negara-negara yang tergabung dalam *Six Party Talks*, yang pada akhirnya perjanjian tersebut kembali dilanggar oleh pihak Korea

⁷⁹ DPRK FM on Its Stand to Suspend Its Participation in Six-Party Talks for Indefinite Periode, "<http://www.kcna.co.jp/item/2005/200502/news02/11.htm#1>", diakses pada 8/12/2012

⁸⁰ Kahn, North Korea Says It Will Abandon Nuclear Efforts

"<http://www.nytimes.com/2005/09/19/international/asia/19korea.html>" diakses pada 8/12/2012

Utara⁸¹, begitu pula dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (*Non Proliferation Treaty*) yang sempat diratifikasi oleh Korea Utara, namun negara ini kembali berubah pikiran dan mundur dari perjanjian tersebut.

⁸¹ North Korea,

“ <http://tonics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/northkorea/index.html>”